

**METAMORFOSIS GERAKAN ISLAM POLITIK:  
RESPON GERAKAN ISLAM TERHADAP PEMERINTAHAN ORDE BARU  
TAHUN 1971-1990**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Disusun Oleh:

**Adi Suhaedi**  
**NIM. 04121773**

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949  
Web: <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail: [adab@uin-suka.ac.id](mailto:adab@uin-suka.ac.id)

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/SKI/PP.00.9/122/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**METAMORFOSIS GERAKAN ISLAM POLITIK, RESPON GERAKAN ISLAM  
TERHADAP PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1971 - 1990**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Adi Suhaedi  
N I M : 04121773  
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juni 2010  
Nilai Munaqasyah : A

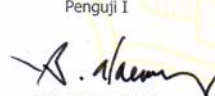
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

  
Zuhrotul Lathifah, M.Hum  
NIP. 19701008 199803 2 001

Penguji I

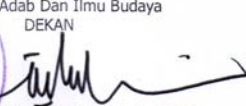
  
Drs. Badrun, M.Si  
NIP. 19631116 199203 1 003

Penguji II

  
Syamsul Arifin, M.Ag  
NIP. 19680212 200003 1 001

Yogyakarta, 23 Juni 2010



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya  
DEKAN  
  
Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.  
NIP. 19520921 198403 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Adi Suhaedi  
NIM : 04121773  
Jenjang : Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Konsentrasi : Sejarah

Menyatakan bahwa dalam tulisan ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Juni 2010  
Saya yang menyatakan,



METERAI  
DEKAT  
E415AAF176034353  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP

**Adi Suhaedi**  
**NIM. 04121773**

**Zuhrotul Latifah, M. Hum**  
Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara Adi Suhaedi

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perubahan  
seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adi Suhaedi

NIM : 04121773

Judul : Metamorfosis Gerakan Islam Politik: Respon Gerakan Islam  
Terhadap Pemerintahan Orde Baru Tahun 1971-1990

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam. Oleh karena itu saya  
berharap skripsi tersebut dalam waktu dekat dapat disidangkan dalam sidang  
munaqosah.

Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 07 Juni 2010  
Pembimbing,

  
**Zuhrotul Latifah, M. Hum**

## **MOTTO**

***“ Hidup Itu Adalah Pilihan ”***

### **PERSEMBAHAN**

- Penulis persembahkan skripsi ini buat almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater walaupun dalam penulisannya masih jauh dari kesempurnaan.
- Dengan cinta kasih dan rasa syukur yang tulus, penulis persembahkan karya ini buat kedua orang tua saya bapak Nana Suharna dan Ibu Engkoy Koriyah yang selalu berdo'a setiap saat demi kesuksesan putra sulungnya.
- Adik besarku Mimin Rasmini yang tidak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studinya.

## ABSTRAKSI

Secara umum menurut Abdullah Ahmed An-Na'im Islam politik dapat didefinisikan sebagai mobilisasi identitas Islam untuk mencapai sasaran dan kebijakan publiknya, baik itu menyangkut masyarakat Islam sendiri, ataupun dengan masyarakat lain. Menurut pemaknaan ini, Islam politik bukanlah hal yang baru, tidak temporal, dan tidak selalu negatif. Sebenarnya mobilisasi identitas Islam untuk memperoleh sasaran tersebut, tentu saja terkait dengan hak legitimate penduduk muslim untuk menentukan nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, persoalan yang perlu disikapi adalah apa yang menjadi sasaran khusus kebijakan politik tersebut, dan bagaimana sasaran ini diwujudkan.

Dalam kasus di Indonesia, "*Islam Politik*" dihadapkan dengan "Islam kultural" yang seakan terjadi dikotomi antara keduanya. Namun jika menurut pemaknaan Ayzumardi Azra bahwa Islam politik yakni Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik, yang kemudian dapat menjelma dalam bentuk partai politik. Lebih tegas lagi Islam politik adalah Islam yang berusaha diwujudkan dan diartikulasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada wilayah eksekutif dan legislatif. Atau memakai kerangka sejarawan MGS Hodgson "*Islam politik*" adalah "*Islamdom*" Islam yang mengejawantahkan dalam bentuk kekuasaan politik.

Yang dimaksudkan penulis dalam kajian ini adalah, upaya untuk mengurai dan menangkap pola hubungan gerakan *Islam politik* dalam dimensi diakronik seiring dengan perkembangan kekuasaan dan politik di Indonesia, di mana Islam menjadi salah satu bagian di dalamnya. Batasan tahun 1971-1990 merupakan keunikan tersendiri, jika dikaitkan dengan rentang waktu yang begitu panjang atas gerakan Islam. Di sisi munculnya pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan developmentalismenya untuk memakasa semua kekuatan termasuk *Islam politik* di dalamnya yang sebelumnya eksis untuk takluk dan mengikuti kemauan otoriter negara. Di satu sisi lain, perubahan besar terjadi menjelang akhir tahun 1970-an dan mulai berkembang pesat pada pertengahan tahun 1980-an. Setelah Orde Baru didirikan, dengan politik direstrukturisasi, agama secara pelan-pelan tidak lagi mengalami politisasi. Dengan adanya kontrol yang sangat ketat terhadap masyarakat sipil, negara secara konsisten berusaha menjegal setiap usaha dari siapapun untuk menggunakan agama sebagai basis ideologi, atau untuk menciptakan struktur kekuatan politik.

Munculnya gerakan pemikiran tidak lepas sebagai konsekuensi kebijakan pemikiran *Islam politik* oleh Orde Baru atau tidak, di tahun 1970-an oleh aktivis muslim baru berusaha untuk mengembangkan format politik Islam yang lebih memperhatikan substansi dari pada bentuk. Dengan model dasar seperti ini, mereka berharap agar soal ke Islaman dan ke Indonesiaan, dua unsur penting yang telah memberikan legitimasi kultural dan struktural bagi konstruk negara maupun bangsa, dapat disintesis dan diintegrasikan dengan baik. Di pertengahan tahun 1980-an, hubungan Islam dan negara mulai mencair lebih akomodatif dan integratif, ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam, serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat Islam. Pada wilayah yang bersifat struktural, kultural, legislatif,

maupun infrastruktur, yang pada tahun 1960-an berjalan lambat, namun pada pertengahan tahun 1980-an sejumlah aktivis Islam menempati posisi penting di birokrasi dan partai.

Perubahan signifikan tersebut terasa sangat berarti jika dilihat strategi politik Islam di masa lalu yang ditandai oleh dua karakter utama: pertama, politik partisan, dan yang kedua: parlemen sebagai satu-satunya medan perjuangan. Yang pertama erat kaitannya dengan pengelompokan Islam sebagai kategori kekuatan-kekuatan politik misalnya (Masyumi, NU, PSII). Sedangkan yang kedua, melihat pada kenyataan pendekatan politik Islam bersifat monolitik. Hal ini dalam pengertian bahwa, cita-cita politik Islam lebih banyak diperjuangkan lewat parlemen. Sementara sasaran lain, yang mungkin secara makro, politik lebih strategis kurang diperhatikan. Karenanya, dapat difahami jika kegiatan-kegiatan NU dan Muhammadiyah yang sifatnya non politik tidak mempunyai makna politik yang lebih strategis. Hingga kemudian strategi politik Islam yang dikembangkan oleh generasi baru muslim lebih bersifat inklusif, dan integratif, serta merumuskannya dalam kerangka cita-cita bersama masyarakat Indonesia keseluruhan.



## KATA PENGANTAR

حَمْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ اللَّهُ رَسُولُ مُحَمَّدًا أَنْ وَأَشْهَدُ إِلَّا اللَّهَ لَا إِلَهَ أَنْ أَشْهَدُ الْعَالَمِينَ، رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ  
بَعْدُ أَمَّا الْعَظِيمُ الْعَلِيِّ بِاللَّهِ إِلَّا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَوْلَ. أَجْمَعِينَ وَأَصْحَابِهِ إِلَيْهِ وَاللَّهُ رَسُولُ عَلَى

Segala puji tercurahkan bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidahnya-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran dari Tuhan, kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawanya ke dunia ini. Amiin.

Penyusunan skripsi berjudul “Metamorfosis Gerakan Islam Politik; Respon Gerakan Islam Terhadap Pemerintahan Orde Baru Tahun 1971-1990” ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir, dan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam di Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syukur *Alhamdulillah*, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penulis sadar bahwa penulisan ini tidak terlepas dari limpahan, rahmat Allah SWT, serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, *Jazakumullah Khairan Katsira* kepada:

1. Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag. selaku Dekan dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Maharsi, M. Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Dr. Imam Muhsin, M. Ag selaku sekretaris Jurusan.
3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag selaku Penasehat Akademik, yang telah memberi banyak pengetahuan dan senantiasa memberikan nasehat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terealisasi dengan baik.
4. Zuhrotul Latifah, M. Hum selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan sumbangan pemikiran, arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, yang telah mau berbagi ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya, bapak Nana Suharna dan ibu Engkoy Koriyah tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga dan iringan do'anya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya untuk meraih gelar sarjana.
7. Keluarga Besar Asrama Al-Mutta'ab Kyai Pondok Buntet Pesantren Cirebon, K.H. Cecep Ahmad Nidzomuddin, K.H. Ade Nasihul Umam, Lc., K.H. Jirjis Umar Yu'to, yang selalu memberikan do'a dan nasihat-nasihatnya, serta spirit tentang hidup yang berlandaskan atas moral keagamaan.

8. Adik besarku Mimin Rasmini yang selalu menemani setiap saat, dan selalu memberikan spirit dan masukannya, serta tidak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.
9. Teman-teman alumni Buntet yang ada di Yogyakarta (INSAN BPC), Khoirul Anam, Wendi Sujatmiko (Kachung), Yogi Budiman (Ombro), Imam Ahmad Bajuri (terimakasih atas numpang ngeprinnya), Masyhudi (Z\_doet), Dedi (Slank yang telah meminjamkan laptopnya), Deden (Boled), Mang Risman Haula (Ganyonk).
10. Sahabat-sahabat PMII angkatan 2004, Korp Kopi: Kholilurrahman (Kipli), Muhammad Muhibin (Paijo), Ahmad Nur Rais, Agus Atiq Murtadho, Ahmad Khotib Januar, Surya Saputra (Pakem), Muhroji, Sumi Panjaitan, Fina Mazida Husna, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Korp Azzuri: Ulin Nuha, Alma, Miftahul Farid (Kuchrut), Korp Poker: Gus Rifqi El-Moe (Guru Pembebasan), dan bagi seluruh kader PMII Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, dari sahabat-sahabat semua, akhirnya penulis bisa belajar banyak apa arti sebuah hidup dalam bingkai persahabatan yang abadi, sahabat-sahabat adalah harta yang tak dapat ternilai dengan apapun.
11. Teman-temanku seperjuangan di Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2004, Delih Kurniawan, Sidiq, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah mereka curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penulis sampaikan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata, penulis berserah diri dengan harapan semoga segala kesalahan dan kekurangan mendapatkan ridha dan ampunan-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.....

Yogyakarta, 07 Juni 2010

Penulis,

**Adi Suhaedi**  
NIM, 04121773

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Landasan Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## **BAB II. AWAL PEMERINTAHAN ORDE BARU**

- A. Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru .....21
- B. Kondisi Islam Politik Pada Awal Pemerintahan Orde baru .....31

## **BAB III. HUBUNGAN ISLAM POLITIK DENGAN PMERINTAHAN ORDE BARU**

- A. Hubungan Yang Bersifat Antagonis .....42
  - a. Gagalnya Pembentukan PDII .....44
  - b. Gagalnya Rehabilitasi Masyumi dan Lahirnya Parmusi .....47
  - c. Aliran Kepercayaan Dalam Sidang Umum MPR 1973 .....51
  - d. Rancangan Undang-Undang Perkawinan .....53
- B. Hubungan Yang Bersifat Akomodatif .....56
  - a. Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional .....57
  - b. Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama .....59
  - c. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila .....61
  - d. Bank Muamalat Indonesia (BMI) .....62
  - e. Semaraknya Media Massa Islam .....63

#### **BAB IV. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU TERHADAP**

##### **ISLAM POLITIK SERTA RESPON ISLAM POLITIK**

A. Penyederhanaan Partai Politik .....	64
B. Penerapan Azas Tunggal .....	68
C. Respon Islam Politik Terhadap Penerapan Azas Tunggal .....	71
a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .....	72
b. Nahdltul Ulama (NU) .....	75
c. Himpunan Mahasiswa Indonesia .....	78
d. Muhamadiyah .....	80
e. Partai Islam Indonesia (PII) .....	84

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	92

#### **DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan adanya perkembangan kekuasaan politik di Indonesia, agama menjadi salah satu bagian di dalamnya. Ke Islaman dan ke Indonesiaan merupakan dua unsur penting yang telah mampu memberikan legitimasi kultural maupun struktural bagi sebuah negara bangsa. Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang amat panjang. Akar geneologisnya dapat ditarik ke belakang akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika Islam seperti dikatakan oleh banyak kalangan pertamakali diperkenalkan dan disebarkan di kepulauan ini. Dalam perjalanan sejarahnya yang kemudian inilah Islam, sambil mengadakan dialog yang bermakna dengan realitas-realitas sosio kultural dan politik setempat, terlibat dalam politik. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa Islam sepanjang perkembangannya di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sejarah politik negeri ini, meskipun ini tidak serta merta mengandaikan bahwa Islam secara inheren adalah agama politik, seperti dikatakan oleh sejumlah pengamat.<sup>1</sup>

Pemberlakuan “Demokrasi Terpimpin” melahirkan struktur politik yang baru. Secara ideologis, pada tahun 1959 Soekarno mulai menetapkan sebuah manifesto politik yang disebut sebagai manipol Undang-Undang Dasar, Sosial, Demokrasi, Ekonomi dan Komunis (USDEK). Secara politik, dalam rangka

---

<sup>1</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Fauzi (Jakarta: Paramadiana, 1998), hlm. 21.



menyatukan semua kekuatan politik demi kepentingan “revolusi yang belum usai”, dia mengusulkan dibentuknya kembali semacam blok nasional. Pilihan yang ditawarkannya menghidupkan kembali gagasan mengenai partai-negara yang bersifat monolitik, atau mengurangi pengaruh partai-partai yang ada, dan kemudian menyatukannya dalam sebuah koalisi luas yang setia dengan Demokrasi Terpimpin.<sup>2</sup>

Dalam bahasa politik, periode 1960-1965 merupakan masa frustrasi bagi Islam politik. Di sisi lain, pada periode ini juga menandai adanya titik balik bagi perkembangan positif gerakan Islam kultural. Pada tingkat tertentu, perhatian muslim mulai beralih dari dunia politik ke dunia pendidikan, pengajaran dan dakwah Islam, dan pelatihan kepemimpinan. Jadi menghadapi dislokasi politik, dakwah Islam mulai berkonsentrasi ke pembangunan sosio-kultural dalam komunitas muslim, sebagaimana pada periode kolonial akibat frustrasi politik.<sup>3</sup> Dalam menilai watak pemerintahan Orde Baru, seperti yang berkembang pada tahun 1970-an sampai 1980-an, terdapat ragam pandangan akademis yang muncul. Dengan mengamati bahwa negara Orde Baru telah menjadi begitu jauh dari suara nurani rakyat, dan tidak memberikan ruang umpan balik dalam persoalan-persoalan kebijakan atau tidak peka dengan kebutuhan-kebutuhan publik, beberapa analisis mendeskripsikan negara Orde Baru itu sebagai sebuah negara yang kuat, monolitik dan memiliki tujuannya sendiri. Dengan mengamati, bahwa negara Orde Baru telah melakukan penindasan terhadap

---

<sup>2</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 393.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 422-423.

kelas, kelompok kepentingan, dan oposisi-oposisi dengan cara menciptakan sebuah system monopoli.<sup>4</sup>

Dengan alasan dan legitimasi atas peristiwa G.30S/PKI Soekarno dijatuhkan dengan berbagai kekuatan, baik elemen mahasiswa, dengan tuntutan trituranya, angkatan darat yang merasa gerah dengan adanya Partai Komunis Indonesia (PKI), maupun Islam sendiri yang berseberangan dengan PKI. Latar belakang lahirnya Orde Baru sepenuhnya didukung oleh Angkatan Darat.<sup>5</sup>

Pemerintah semakin menyadari bahwa adanya kekuatan Islam merupakan kekuatan yang sulit untuk dilemahkan, yang bila dibiarkan akan mengancam kesinambungan pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memperhitungkan kekuatan Islam adalah nomer dua setelah komunis yang paling ditakuti, maka dicanangkan label ekstrim kanan untuk melumpuhkan kekuatan Islam.<sup>6</sup>

Di Indonesia, situasi hubungan Islam dan negara tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kawasan dunia Islam lainnya. Untuk waktu yang cukup lama, sejarah Islam kontemporer ditandai oleh kemandegan politik dalam hubungannya dengan negara, bahkan Islam politik pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Karena ada persepsi yang sedemikian itu, pihak negara berusaha untuk menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 454-455.

<sup>5</sup> Al Chaedar, *Reformasi Premature (Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total)* (Jakarta: Darul Falah, Penerbit Buku Islam, 1999), hlm. 27-28.

<sup>6</sup> Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti, (Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998)* (Jakarta: PT. Raja 1999), hlm. 42-52.

gerakan ideologi politik Islam. Lebih dari itu, politik Islam sering dicurigai anti ideologi negara pancasila.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru bersifat tekno birokratik, yang berbeda dengan pengambilan kebijakan yang mengharuskan adanya proses tawar menawar yang panjang di antara berbagai partai politik dan kelompok kepentingan. Pengambilan kebijakan yang tekno birokratik ini dimungkinkan oleh intervensi pemerintah terhadap mekanisme-mekanisme dan infrastruktur politik. Sebelum pemilihan umum 1971 diadakan, aturan-aturan politik dan infrastruktur telah ditetapkan untuk kepentingan rezim. Pemerintah juga berusaha sekuat mungkin untuk melumpuhkan partai-partai politik yang ada, yang lebih penting lagi, sebelum pemilihan umum diadakan, rezim Orde Baru juga telah mempersiapkan kendaraan politiknya yang baru untuk memenangkan pemilihan umum, yaitu sekretariat bersama Golongan Karya yang sejak 17 Agustus 1971 dikenal sebagai Golongan Karya (Golkar).<sup>8</sup>

Secara politik Islam semakin tidak menguntungkan, khususnya sejak pemerintahan Orde Baru melakukan restrukturasi format politik Indonesia, banyak pemimpin dan aktivisnya menjadi reaktif. Sementara di mata pengamat, hal ini merupakan ketidakmampuan para pemikir dan aktivisnya politik Islam untuk merumuskan jawaban secara cerdas. Meskipun agenda politik mereka (keterlibatan secara langsung pimpinan Masyumi dan Parmusi) ditolak oleh pemerintahan Orde

---

<sup>7</sup> Bahtiar Effendi, *Islam Politik dan Islam Kultura Edisi Khusus*, Majalah *Prisma* (LP3ES 1995), hlm. 4.

<sup>8</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa Abad ke-20*, hlm. 471-472.

Baru, mereka secara politik tidak bergeming. Banyak yang menerjemahkan sikap seperti ini sebagai tindak kurang luwesnya kalangan Islam dalam berpolitik.<sup>9</sup>

Di bawah pemerintahan Orde Baru, negara telah menjadi sedemikian kuatnya. Tidak seperti pada masa Orde Lama, negara telah mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat mengatur hubungan dengan kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada. Termasuk karakteristik yang menunjuk pada kuatnya sebuah negara kemampuan negara berfungsi sebagai aktor paling dominan dalam pembangunan sosial dan politik masyarakat. Memahami politik secara luas dalam pengertian yang sebenarnya mencakup program, strategi, dan wilayah perjuangan, tidak hanya wacana politik yang bersifat partisan dengan parlemen sebagai satu-satunya medan perjuangan.<sup>10</sup>

Setelah sekian lama terpinggirkan dari panggung kehidupan politik dan ekonomi nasional, umat Islam memandang dengan penuh harapan terhadap pemerintahan baru yang naik kekuasaan 1965-1966 itu. Bagi sebagian dari mereka, pemerintahan yang baru ini tampak akan menawarkan kemungkinan satu “Orde” yang baru yang bakal mengembalikan Islam ke posisi yang sah dalam kehidupan politik. Namun demikian, sejak awal sudah muncul tanda-tanda yang menunjukkan sikap ambivalensi sebagai penguasa Orde Baru terhadap organisasi politik umat Islam, dan juga terhadap politik kaum sipil secara keseluruhan. Dari pada menekan kegiatan politik umat Islam mensekularisasi politik (seperti yang dianjurkan oleh kaum elit), pemerintah lebih memilih langkah politik yang sifatnya menggabungkan

---

<sup>9</sup> Bahtiar Effendi Islam Politik dan Islam Kultural , Majalah *Prisma*, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

antara kontrol yang keras terhadap Islam politik dan dukungan penuh terhadap Islam spiritual.<sup>11</sup>

Selama Orde Baru (1966-1998), taktik menekan politik Islam seraya mendorong kesalehan beragama ini telah memberi ruang yang lebih bagi umat Islam, dibandingkan dengan organisasi-organisasi berbasis massa lainnya. Perkumpulan-perkumpulan umat Islam menjadi pusat diskusi-diskusi yang hangat mengenai politik dan moralitas publik. Sejak awal, wacana-wacana Islam yang berkembang di dalam diskusi-diskusi tersebut amatlah bervariasi. Dengan perkembangan-perkembangan semacam ini, umat Islam pada tahun 1980-an mengalami satu kebangkitan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada akhir 1980-an, kebangkitan tersebut memunculkan tekanan politik baru ketika kelas menengah ini mendesak representasi yang lebih besar bagi umat Islam dalam pemerintahan dan masyarakat.<sup>12</sup>

Kecenderungan untuk mengidentikkan Islam politik dengan organisasi-organisasi sosial politik Islam juga telah menimbulkan kerancuan lain yang lebih serius. Misalnya, kecenderungan ini sering kali digunakan secara salah untuk menjelaskan manuver politik Orde Baru yang lebih awal dalam membangun negara yang kuat dan stabil, yang memberikan prioritas utama kepada pembangunan ekonomi. Manuver-manuver ini, yang luas dikenal sebagai depolitisasi, dilakukan baik pada tingkat organisasional-kelembagaan maupun individual. Empat partai Islam

---

<sup>11</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001), hlm. 114.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 114 – 115.

(Parmusi, NU, Perti, dan PSII) pada waktu itu diharuskan meleburkan diri ke dalam sebuah partai baru, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai Islam yang pada pertengahan 1980-an didesak untuk meninggalkan ideologi dan syimbol-syimbol Islamnya. Nasib serupa juga harus dihadapi oleh dua partai politik Kristen (Parkindo dan IPKI) dan tiga partai politik “nasionalis” (PNI, Partai Katolik, Murba) yang meleburkan diri ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebuah partai yang juga baru dibentuk.<sup>13</sup>

Proses sekularisasi, bagaimanapun tidak mesti difahami sebagai lenyapnya ekspresi dan identitas agama di dunia politik, karena sebagian penduduk masih berorientasi pada agama dan sepanjang politik kewarganegaraan pada masyarakat modern Indonesia masih lemah, partai-partai massa berbasis agama akan terus menjadi kekuatan politik utama. Di samping itu, dalam masyarakat yang mencerminkan pluralisme agama, agama sering digunakan sebagai simbol identitas kepercayaan dalam politik. Partai-partai massa berbasis agama muncul sebagai respons terhadap konflik aktual yang terjadi dalam masyarakat plural-agama demi melindungi kepentingan-kepentingan komunal. Komunitas-komunitas agama menjadi terpolitisasi dalam situasi-situasi konflik, kendati isu-isu sebenarnya lebih bersifat sosial, politik, dan ekonomi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, hlm. 53-54.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 402-403.

## B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kerancuan dalam menginterpretasikan masalah yang akan diteliti.

Dalam kajian sejarah, pembatasan masalah paling tidak terdiri dari pembatasan waktu, pembatasan ruang, dan pembatasan obyek penelitian.<sup>15</sup>

Yang dimaksud penulis dalam kajian ini adalah upaya untuk mengurai dan menangkap pola perubahan gerakan *Islam politik* seiring dengan adanya perkembangan politik di Indonesia, di mana Islam menjadi salah satu bagian di dalamnya. Dengan batasan tahun 1971-1990 merupakan ciri khas tersendiri atas terjadinya gerakan *Islam politik* di Indonesia, jika dikaitkan dengan sejarah perjalanan Islam Indonesia. Di satu sisi, munculnya pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan developmentalismenya memaksa semua kekuatan termasuk *Islam politik* di dalamnya yang sebelumnya eksis untuk takluk dan mengikuti kaulan otoriter negara. Pada sisi lain, perubahan besar terjadi menjelang akhir tahun 1970-an, dan mulai berkembang pesat pada pertengahan tahun 1980-an. Setelah Orde Baru didirikan dan politik direstrukturasi, agama secara perlahan tidak lagi mengalami politisasi. Dengan kontrol yang sangat kuat terhadap masyarakat sipil, negara secara konsisten berusaha menjegal setiap usaha dari siapapun untuk menggunakan agama sebagai basis ideologi atau untuk menciptakan struktur kekuatan politik.

---

<sup>15</sup> Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Mekah dan Madinah, 1800-1925* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 10.

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah respon gerakan Islam politik terhadap pemerintahan Orde Baru. Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menentukan batasan dan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola gerakan Islam Politik di masa Orde Lama, masa krisis (perpindahan dari Orla ke Orba) dan di masa Orde Baru.
2. Bagaimana pemaknaan dan respon gerakan Islam terhadap hubungan Islam dan negara.
3. Bagaimana kebijakan pemerintahan Orde Baru Terhadap Islam politik

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami pola gerakan Islam Politik serta hubungan Islam dengan negara, yang dapat difokuskan atas respon gerakan Islam politik terhadap pemerintahan Orde Baru. Dari sana akan terlihat bagaimana strategi gerakan Islam dalam merespon tantangan perubahan zaman. Di samping itu diharapkan penelitian ini bisa menjelaskan gambaran detail respon gerakan Islam terhadap pemerintah Orde Baru yang berusaha meminggirkan setiap kekuatan yang berseberangan dengannya. Tentunya sebagai sebuah karya akademik diharapkan penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk diteliti lebih lanjut untuk mengungkap perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia.



#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga banyak mengacu dari kepustakaan. Telah banyak kajian akademik tentang Islam Politik di Indonesia. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis lebih menitiktekan pada gerakan pemikiran Islam Politik yang terjadi pada era Orde Baru, dan inilah perbedaan dengan tulisan-tulisan mengenai Islam Politik sebelumnya, bahkan tidak hanya kontek pemikiran saja, namun penulis juga mencoba untuk mengurai pola hubungan Islam dan negara pada masa peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru. Untuk lebih menarik dalam pembahasan ini penulis mencoba mencantumkan batasan tahun 1971 sampai era 1990-an.

Memang sudah terlihat sebelumnya upaya-upaya rintisan, baik itu dalam bentuk disertasi ataupun tulisan lainnya yang dilakukan oleh Bahtiar Effendi dalam berbagai media: pertama, *Majalah Prisma* edisi khusus tahun 1995 yang berjudul “*Islam Politik dan Islam Kultural, 199.*” Dalam tulisan tersebut Bahtiar Effendi mencoba mengupas tuntas hubungan Islam dan negara (Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia), yang diilhami oleh kenyataan bahwa sejak pudarnya kolonialisme barat pada pertengahan abad ke duapuluhan dunia Islam ( misalnya, Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Malaysia, Aljazair, dan sebagainya ) mengalami kesulitan dalam upaya menciptakan sintesa yang memungkinkan antara Islam dan negara.

Kedua, Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa Abad ke-20*, ( Bandung: Mizan, 2005 ). Di dalamnya ( bab 5 ) diulas tentang adanya tindakan represif dari

pemerintahan Orde Baru serta adanya respon balik dari kalangan-kalangan intelektual Islam. Dengan keterbukaannya ruang publik pada awal-awal Orde Baru, memberikan kesempatan bagi beberapa media yang waktu itu pernah dibumihanguskan selama Demokrasi Terpimpin dijalankan untuk kembali terbit. Dengan adanya ruang publik baru ini memori tentang “adanya penghianatan terhadap intelektual selama Demokrasi Terpimpin” bermunculan dalam bentuk artikel-artikel di media massa.

Ketiga, Bahtiar Effendi, dalam bukunya “*Islam dan Negara Transformatif Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Paramadina, 1998). Pembahasan buku ini, meliputi hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia. Dalam hal hubungan politiknya dengan negara Indonesia, Islam sudah mengalami jalan buntu yang sangat panjang, baik dalam pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto, partai-partai politik yang berbasis Islam di pandang sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat menghancurkan landasan negara yang nasionalis. Dengan alasan inilah, empat dekade, kedua pemerintahan tersebut berupaya untuk melemahkan dan menjinakkan partai-partai yang berlandaskan Islam.

Ke empat, Sudirman Tebba, dalam bukunya “*Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan* ”, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993). Karya ini sebenarnya hampir sama berusaha dengan yang di atas yang menjelaskan perubahan gerakan Islam di masa Orde Baru. Namun tidak secara gamblang menjelaskan titik tolak perubahan gerakan Islam itu sendiri dan hubungannya dalam perjalanan Orde Lama. Di samping itu kausalitas perubahan lebih dititikberatkan pada adanya proses

birokratisasi dan lemahnya cita Islam. Tanpa melihat variabel-variabel lain yang lebih luas.

### **E. Landasan Teori**

Suatu kajian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bila didasarkan atas satu atau beberapa teori. Landasan teori sebagai kerangka berfikir adalah jalan fikiran menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan dan menunjukkan masalah-masalah yang akan diidentifikasi. Kerangka teori yang relevan, akan berfungsi sebagai penuntun dalam menjawab, memecahkan atau menerangkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi itu, atau dalam target yang lebih dekat berguna untuk merumuskan hipotesis.<sup>16</sup> Politik didefinisikan bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang pemberi definisi. Akan tetapi, pada umumnya definisi politik menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Perhatian ilmu politik ialah pada gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan, kebijakan dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Dalam proses pembentukan suatu negara tidak lepas dari hal berikut: pertama, adanya kesamaan identitas yang biasanya dirumuskan sebagai system nilai yang dianut masyarakat. Kedua, adanya konsep negara yang berfungsi sebagai pengelompok masyarakat atas dasar adanya satu struktur kekuasaan yang

---

<sup>16</sup> Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta, 2003), hlm. 27.

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm.173.

memerintah. Ketiga, wilayah yang jelas batasan-batasannya yang tidak hanya sebagai tempat bermukim, dan menjadi batas berlakunya kewenangan pemerintah, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dunia. Keempat, adanya pemerintah yang berkeabsahan dan mampu menggerakkan serta mengarahkan seluruh potensi masyarakat.<sup>18</sup>

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban ( *obligations* ) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.<sup>19</sup>

Menurut Bahtiar Effendy, berkembangnya pemikiran baru Islam di akhir Orde Lama dan menjelang naiknya Orde Baru didorong oleh krisis yang dihadapi komunitas politik Islam. Nada dasar intelektualisme baru ini dibentuk dan dipengaruhi oleh situasi politik yang tidak menguntungkan Islam serta akibat negatifnya yang dirasakan oleh para pemikir dan aktivisnya. Kondisi yang tidak mengenakan ini muncul, antara lain disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis dan integrative antara Islam dan negara. Dalam konteks yang demikian, munculnya pemikiran baru Islam ini dapat dilihat sebagai *panacea* untuk menciptakan sebuah sintesa Islam dan negara yang secara sosiologis-keagamaan lebih sesuai. Sejauh ini, upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan

---

<sup>18</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 52-53.

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 30.

pemikiran-pemikiran keagamaan dan aktivisme politik yang dianggap sesuai dengan situasi sosial-keagamaan masyarakat Indonesia yang heterogen.

Generasi aktivis dan pemikir Muslim baru yang menjadi motor penggerak, sejak awal 1970-an berusaha untuk mengembangkan format politik Islam yang lebih memperhatikan isi (*substance*) daripada bentuk (*form*). Dengan modal dasar semacam ini, mereka berharap agar soal “ke-Islaman” dan “ke-Indonesiaan”- dua unsur penting yang memberikan legitimasi kultural dan struktural bagi konstruk negara-bangsa- dapat disintesakan dan diintegrasikan dengan baik. Intelektualisme Islam baru ini terdiri dari tiga wilayah (1) pembaharuan pemikiran keagamaan; (2) pembaharuan politik/birokrasi; dan (3) transformasi sosial.<sup>20</sup>

Pemilahan Intelektualisme Islam tersebut semakin ditegaskan oleh Munawwir Sadzali dalam pengkategoriannya terhadap paradigma pemikiran Islam dalam melihat hubungan agama dan negara.<sup>21</sup> *Pertama*, pendapat legal-formal ini menyatakan bahwa Islam tidaklah sekedar agama sebagaimana dikatakan pada masyarakat barat yang terlepas dari kehidupan politik pada umumnya. Namun lebih dari itu agama selain mengurus aspek spritualitas-ukhrawi juga berkaitan dengan problem keduniaan. Islam di sini selain difahami secara sistemik sebagai sumber dan paradigma nilai juga diyakini menyangkut dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, dari mulai norma individu, persoalan keluarga, sosial ekonomi sampai ketatanegaraan. Islam sendiri sebenarnya sudah mempunyai konsep politik Islam,

---

<sup>20</sup> Bahtiar Effendi, *Islam Politik dan Islam Kultural*, Majalah *Prisma*, hlm. 7-8.

<sup>21</sup> Munawwir Sadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 1-2.

karena itu umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan yang Islami sebagaimana pernah dipraktikkan Nabi di Madinah dan masa kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin.

*Kedua*, pendirian yang menyatakan bahwa Islam sebenarnya tidak pernah dimaksudkan sebagai sebuah sistem politik. Menurut paradigma sekuler ini, keberadaan Islam tidak lebih bersifat privat. Misi Nabi Muhammad tak lebih sebagai rasul, bukan sebagai pemimpin politik untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

*Ketiga*, pendirian yang menengahi antara dua ekstrem pemikiran tersebut. Pola pemikiran yang disebut substantif ini selain menolak pandangan bahwa Islam adalah agama yang sudah lengkap dan menggariskan sebuah tata pemerintahan khusus sebagaimana diyakini paradigma pertama yang cenderung fundamentalis, juga menolak pendapat yang berasal dari pihak liberal yang menyatakan bahwa Islam tak lebih sebagai urusan privat dan tak ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Sebenarnya pendapat ini agak memiliki kemiripan dengan pendapat kedua, namun dengan penekanan dan sikap yang lebih moderat. Menurut kelompok ketiga ini, dalam Islam sebenarnya terdapat etika dan nilai tertentu bagi kehidupan bernegara namun tidak menggariskan secara khusus teori tentang tetanegara.

Bisa dilihat bahwa perubahan format gerakan Muslim baru lebih dekat kepada paradigma ketiga yang dikategorikan oleh Munawwir Sadzali. Dari perspektif intelektualisme baru Islam, persoalan yang dihadapi oleh konstituen politik Islam tidak hanya berkaitan dengan isu-isu yang bersifat “praktis”. Meskipun kenyataan menunjukkan bahwa masalah yang menghadang memiliki warna politik yang kental,

akar persoalan yang sebenarnya berada di luar wilayah “praktis”.

Diskursus intelektual pemikiran politik Islam Indonesia, khususnya yang menyangkut hubungan antara Islam dan negara, para pendukung gerakan pemikiran baru ini sampai pada kesimpulan bahwa persoalan yang dihadapi berhubungan erat dengan, kalau tidak malah berakar pada, dasar-dasar keagamaan/teologis (*religious/theological underpinnings*) politik Islam. Dalam pandangan mereka, dasar-dasar keagamaan ini- yang sebenarnya merupakan produk pemahaman masyarakat Islam atas doktrin agamanya- mempengaruhi dan membentuk pemikiran dan tingkah laku politik Islam.<sup>22</sup>

Akibat penegasan kembali dimensi kultural ini adalah “bahwa Islam kultural di Indonesia benar-benar hidup dan berkembang baik”. Dalam pandangan Emmerson, “pemerintah sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk menentang kesalehan religius”. Bahkan, sebaliknya kesalehan religius dipandang penting untuk memperkokoh definisi-diri Orde Baru yang anti-komunis”. Dilihat dari perspektif ini, maka bobot Islam kultural secara lebih besar dapat mempengaruhi pemerintah untuk menawarkan sejumlah konsesi kepada umat Islam.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang terpenting, sebab metode penelitian tersebut membantu mempermudah dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 8.

<sup>23</sup> Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran*, hlm. 46-47.

memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti dan menentukan hasil yang akan dicapai.

Dasar utama metode sejarah adalah bagaimana meramu bukti-bukti sejarah dan menghubungkannya satu sama lain. Setelah menemukan berbagai macam bukti diteliti dan ditafsirkan kembali sesuai dengan imajinasi peneliti dan tetap berdasarkan atas data-data yang ada. Jadi, potongan peristiwa dan fakta sejarah menjadi penting untuk membantu merumuskan fakta sejarah sehingga terbentuk gambaran sejarah yang utuh dan jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang ingin menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan serta hasil atas peristiwa manusia yang telah berlangsung pada waktu yang telah lewat. Penelitian sejarah ini diharapkan dapat menjelaskan secara sistematis dan bertanggung jawab secara akademik sesuai prosedur keilmuan, sehingga menghasilkan laporan sejarah tentang pemikiran utuh yang juga melihat sisi perjuangannya dalam menegakkan demokrasi politik dan ekonomi.

Penelitian ini tentang masa lampau , sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu suatu metode yang ditempuh melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman-rekaman peristiwa masa lampau, yang kemudian direkonstruksi secara imajinatif melalui proses historiografi.<sup>24</sup> Dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek

---

<sup>24</sup> Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1969), hlm. 35.



pembahasan dalam skripsi ini, penyusun mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Heuristik*, yaitu suatu tahapan dalam pengumpulan data baik tertulis maupun lisan yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur dengan cara menelaah isinya melalui buku-buku, catatan, manuskrip, dan dokumen-dokumen yang telah ada. Dari berbagai sumber tersebut dicari sumber-sumber yang primer dan sekunder, dengan pemilahan yang jelas, sehingga akan memberikan informasi yang kredibel dan “original” serta tidak menimbulkan multi tafsir terhadap kajian serupa.

2. *Verifikasi*, yaitu menguji dan menganalisa data secara kritis. Kritik sumber ini dilakukan dengan dua cara yaitu ekstern dan intern. Kritik ekstern berusaha menilai jawaban terhadap apa, di mana, bagaimana, dan dari bahan apa penulisan sejarah tersebut. Kritik ekstern dilakukan untuk mencari keautentikan sumber. Adapun kritik intern berusaha mencari pembuktian yang sebenarnya dari sumber tersebut. Dengan kritik ini diharapkan dapat mendapatkan validitas sumber sejarah, sehingga dapat menentukan fungsi dan jenis sumber (yaitu apakah sumber primer maupun sekunder dan apakah sumber sejarah ataupun sumber teoritis) yang digunakan dalam penelitian.

3. *Interpretasi*, atau sebuah penafsiran sejarah seringkali disebut analisis sejarah, secara terminologis analisis berarti menguraikan, berbeda dengan sintesis

yang berarti menyatukan. Namun keduanya dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi.<sup>25</sup>

4. *Historiografi*, yaitu merupakan langkah terakhir dalam penelitian dengan menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah. Historiografi ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan sistematika yang telah dibuat penulis. Setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi dan analisis, dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dari suatu peristiwa.<sup>26</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pada dasarnya hasil dari penelitian itu mempunyai tiga bagian, yaitu: pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan.<sup>27</sup>

Untuk mempermudah pemahaman dan agar skripsi ini lebih terfokus pada pokok studi, maka pembahasan skripsi ini penulis sistematisasikan sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah yang mengarahkan pembaca mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Dalam bab pertama ini juga dijelaskan tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan sistematika pembahasan. Melalui bab

---

<sup>25</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 64.

<sup>26</sup> Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964), hlm. 22-29.

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2005), hlm. 105.

ini diungkapkan sekilas gambaran umum tentang penulisan skripsi sebagai dasar pijakan dalam pembahasan selanjutnya.

Bab II gambaran umum yang memfokuskan pembicaraan pada situasi historis dan latar belakang konsolidasi pembentukan Orde Baru dengan peran umat Islam di dalamnya.

Bab III berisi sketsa pemetaan respon gerakan umat Islam terhadap kebijakan Orde Baru, terutama pengekangan atau peminggiran kekuatan-kekuatan politik secara sistematis dan yang dianggap berseberangan dengan pemerintah termasuk Islam politik di dalamnya, serta penjelasan tentang hubungan antara Islam dan negara.

Bab IV merupakan inti dari skripsi ini yang berisi pembahasan tentang perubahan atau metamorfosa gerakan Islam politik dalam merespon pemerintahan Orde Baru. Di dalamnya juga dijelaskan implikasi-implikasi intelektualisme Islam Baru dalam konsep dan praksisnya.

Bab V berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Selanjutnya saran-saran juga tertuang dalam bab ini.

## **BAB V**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas dapat diambil kesimpulan tentang adanya penaran politik, kebijakan, serta tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, sekaligus adanya respon dari golongan Islam politik yang ikut andil di dalamnya.

Dengan menggunakan persepektif yang lebih luas, semua penjelasan di atas dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Mengingat bahwa Islam secara inheren adalah agama politik, maka jawabannya bisa mengarah pada hal yang positif dan bisa juga ke hal yang negatif. Jelasnya tergantung pada jenis Islam yang akan diteliti atau dianalisis. Begitu juga dengan masalah hubungan politik antar Islam dan negara di Indonesia, jika dilihat dari sejarah politik yang berkembang tergantung pada diskursus Islam politiknya.

Sebagaimana Jamal al-Din al-Afghani di Mesir ketika itu mengibarkan bendera ideologi politik Pan Islamisme untuk menentang kolonialisme Eropa, mereka melihat ke dalam dan mengibarkan corak "holistik" Islam dalam rangka menentang Westernisme. Akan tetapi tidak semua umat Islam di Indonesia menggunakan jenis politik ini yang telah menaruh harapan besarnya terhadap negaranya Indonesia, untuk menolak gagasan tersebut dan bahkan dengan sekuat tenaga mencoba menjinakkannya dari arena politik. Penjinakan politik ini, mengakibatkan tersingkirkannya kekuatan Islam politik dari setiap proses politik secara keseluruhan. Belakangan ini khususnya 25 tahun pertama ketika berkuasanya pemerintahan Orde

Baru, Islam politik telah dijadikan bentuk sasaran negara atas kecurigaan ideologi politik sekaligus politik penyingkiran oleh pihak negara, disebabkan karena Islam politik dipandang sebagai penentang ideologi Pancasila.

Ada satu pola gerakan yang tidak boleh ditinggalkan dalam babakan sejarah politiknya di Indonesia. Satu hal yang mungkin sangat relevan untuk dijadikan sebagai tinjauan adalah dampak perubahan politik, sosial, ekonomi, yang diakibatkan oleh lahirnya pemerintahan Orde Baru di antara dua kekuatan politik Orde Lama dan Orde Baru. Proses peralihan Orde Lama ke Orde Baru diawali dengan munculnya peristiwa G 30 S/PKI yang telah menimbulkan berbagai kekacauna di bidang ekonomi, politik, maupun sosial kemasyarakatan serta menimbulkan perubahan drastis dan prinsipil terhadap kehidupan perpolitikan di Indonesia. *Pertama*, berakhirnya kepemimpinan Soekarno dan runtuhnya kehidupan perpolitikan di Indonesia. *Kedua*, meningkatnya peran politik ABRI. *Ketiga*, lahirnya Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto dengan menggunakan Demokrasi Pancasila. G 30 S/PKI menimbulkan berbagai kekacauan, demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat dimana perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru berlangsung melalui kerja sama antara pihak militer dengan gerakan-gerakan pemuda yang disebut dengan angkatah 66. Dan inilah mungkin yang dapat dikatakan sebagai bentuk pola peralihan pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru.

Dalam situasi yang demikianlah sebetulnya generasi baru Islam dan para aktivis muslim Indonesia yang mulai berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan mengguakan tiga aliran yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu dengan yang

lainnya. Yakni; adanya pembaruan teologis atau keagamaan, reformasi politik dan birokrasi, serta adanya transformasi sosial, dengan tujuan utama dari gerakan ini adalah mentransformasikan gagasan Islam politik yang sebenarnya. Berkat adanya gerakan baru Islam ini, Islam politik telah menemukan sebuah format baru dalam konteks ke Indonesiaan. Adapun bentuk atau ciri dari format gerakan baru ini adalah; landasan teologis, tujuan dan pendekatan Islam politik yang digunakan, dapat dinilai sama dengan konstruk negara di Indonesia.

Dalam hal teologis misalnya, format baru Islam politik ini, tidak membutuhkan adanya kaitan legalistik dan formalistik antara Islam dan negara. Sejauh negara tersebut, baik itu dilihat secara kepentingan maupun ideologis, dapat berjalan di atas sebuah sistem yang berjalan yang mengarah pada sebuah nilai yang tidak bertentangan dengan semua ajaran-ajaran Islam. Maka, cukup bagi setiap kalangan aktivis muslim untuk memberikan loyalitasnya dan dukungannya terhadap sebuah negara bangsa. Hal ini juga tentunya membuat mereka (kalangan aktivis muslim) dapat menerima Pancasila sebagai bantuk ideologi negara.

Lebih dari itu, terlihat pada tahun 1980-an Islam politik tampaknya sudah mulai menemukan jalan baru untuk mulai mengintegrasikan dirinya ke dalam politik nasional. Terlihat juga adanya beberapa indikasi yang menilai bahwa negara mulai memandang Islam politik tidak lagi sebagai lawan politik, kekuatan yang mengancam, atau apalah namanya yang dapat merobohkan kekuasaan pemerintah kala itu, melainkan sebagai bentuk kekuatan di luar birokrasi untuk saling melengkapi satu sama lain dalam menghadapi isu pembangunan nasional.

Bukti kongkrit yang dapat memperlihatkan adanya perkembangan gerakan baru ini yakni; sikap pemerintah yang mulai ramah terhadap kalangan Islam. Tentunya dari sikap ini lahir beberapa kebijakan tertentu yang dipandang satu tujuan dengan kultural dan politik umat Islam. Termasuk dengan hubungan akomodatifnya antara Islam dan negara. Seperti telah disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) pada tahun 1988, yang telah mewajibkan pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, setelah itu disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) pada tahun 1989, dalam setiap menyelesaikan masalah perkawinan dan lain sebagainya, serta pembentukan Bank Muallamat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.

Dalam konteks ini, jelas dikatakan bahwa konsep Islam politik yang mengarah formalistik dan legalistik akan muncul kembali ketika ketertindasan sosial ekonomi dan politik terjadi. Seperti pengalaman sebelumnya para aktivis Islam politik akan mencari solusi atas itu dengan corak Islam yang holistik untuk menentang negara yang semakin tidak karuan.

### **A. Saran-saran**

1. Dalam ranah nasioanal Islam politik harus mampu memberikan langkah langkah, dan format baru dalam menata gerakan sosial politiknya, sehingga mampu mendapatkan ruang umpan balik untuk menata konsep negara bangsa secara berbarengan antara kalangan umat Islam dan negara.

2. Negara harus mampu memberikan peluang atau ruang politik, demi kebebasan berekpresi dalam melakukan kegiatan politik, baik itu pada wilayah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semuanya harus ada pola keseimbangan dalam membangun sebuah negara bangsa.

Penelitian mengenai pola hubungan Islam dengan negara di Indonesia pada masa modern ini, menjadi sangat menarik ketika kaitannya dengan kontribusi dan perjuangan dari golongan Islam. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan lahirnya pandangan-pandangan baru tentang hubungan Islam dan Negara. Lebih dari itu yang lebih penting dalam penelitian ini, semoga dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mengungkap sebuah fenomena sejarah politik Islam di Indonesia.

Penulis,

Adi Suhaedi



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdul Aziz, *Politik Islam Politik; Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2006.
- Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1976.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik, (Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1990.
- Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- , *Beberapa Pembaharuan Politik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- , *Pemikiran dan Pembaharuan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1978.
- Al Chaedar, *Reformasi Premature (Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total)*, Jakarta: Darul Falah, Penerbit Buku Islam, 1999.
- Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti, (Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998)*, Jakarta: PT. Raja 1999.
- Allan Samson, *Islam In Indonesia politics*, Asian Survey, No. 12, Vol. VII, Desember 1968.
- Andree Feillard, *NU VIS-a Vis Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Adian Husini, *Soeharto*, Jakarta: Gema Insani Press. 1987
- Affan Gaffar, *Javanese Voters, a Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Fauzi, Jakarta: Paramadiana, 1998.

-----, Islam Politik dan Islam Kultural, *Prisma* Edisi Khusus No. 05-1995.

Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Mekah dan Madinah, 1800-1925* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Inonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, Jakarta: Grafirti Press, 1985.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta, 2003.

Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Azaz Tunggal*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984.

-----, *Muhammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Donald Wilhelm, *Indonesia Bangkit*, terj. Suli Suleiman, Jakarta: UI Press, 1981.

Fachri Ali, *Merosotnya Aliran dalam PPP*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Fuad Hasan, “Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sadari Taggunjawabnya Laksana Pembangun”, *Suara Merdeka*, 3 Mei 1991.

Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.

Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia; Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1975*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Freyer and James Jackson, *Indonesia*, London: Ernest Benn; Boulter, Colo: Westview, 1977.

Fathi Osman, *Parameters of The Islamic State*, Arabia, The Islamic World Review, 1983.

Fred R. Von der Mehden, *Islam and The Rise of Nationalism in Indonesia*, Itacha, Cornell University Press, 1952.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1969.

Guy J Pauker, *Indonesia In 1966: The Year Of Transition*, California: The RAND Corporation, 1967.

Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

Ibrahim Alfian, *Tentang Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.

Indrio Somego, *Demitalagiasasi Politik Indonesia, Mengusung Elitism dalam Orde Baru*, Jakarta : PT. Pustaka Cresindo, 1999.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.

-----, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.

-----, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2005.

Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara, dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Lukman Harun, *Muhamadiyah dan Azaz Tunggal Pancasila*, Jakarta: Pustaka panjimas, 1986.

Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer*, Jakarta : LP3ES, 1992.

Muhammad Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.

M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali, 1983.

-----, *Dinamika Islam di Indonesia Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Yogyakarta: PT. Hanindita, 1985.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI-Press, 1993.

-----, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UIP, 1993.

M.c Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.

- Mortimer Rex, *Class Social Cleavage and Indonesia Communism*, Indonesia, No. 8. Oktober 1968.
- M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, Yogyakarta: Al-Amin press, 1996.
- Mundzirin Yusuf dkk, *Sejarah Peradaban Islam di Indoenesia*, Yogyakarta: Pustaka, 2006.
- Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata, 1964.
- O.G. Reader, *Anak Desa ( Biografi Presiden Soeharto )*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1976.
- Robert W. Hefner, *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso ,Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,1992.
- Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1976.
- Rex Mortimer, *Class Social Cleavage and Indonesia Communism*, Indonesia, No. 8. Oktober 1968.
- R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru; Pasang Surut Kekuatan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Riswanda Imawan, *The Evolution of Political Party Systm in Indonesia; 1900 to 1987*, Northem Illionois University.
- Syafrudin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia;Pertautan Negara, Kholifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.
- Syafrudin Juhri, *PPP, NU dan MI; Gejolak Wadah Politik Islam*, Jakarta: Integrita Press, 1984.
- Syamsudin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1991.

Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru; Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993.

Selo Sumarjdan, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

ST Sularso, *Dialog dengan Sejarah Seratus Tahun*, Jakarta: Kompas, 2001.

Syafi'I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Thabrani dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Theology untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*, Yogyakarta: Sipres, 1994.

Umaid Raudi, *Strategi PPP 1973-1982; Suatu Study Tentang Politik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta: Integrita Press, 1984.

Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa Abad ke-20*, Bandung: Mizan, 2005.

Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 1973.

## **CURRICULUM VITAE**



Nama	: Adi Suhaedi
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Majalengka, 20 Januari 1985
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nama Orang Tua	: Nana Suharna
Pekerjaan	: Petani
Alamat Rumah	: Dusun Sukamaju Desa Paniis, Maja, Majalengka
Alamat Yogyakarta	: Komplek Polri Blok A2, No. 41. Gowok Sleman
No. telp.	: 081-324-404-892

### **I. Latar Belakang Pendidikan**

#### **1. Formal**

- SDN Paniis III : (1992-1998)
- MTs Putra I Buntet Pesantren Cirebon : (1998-2001)
- MAKNU Buntet Pesantren Cirebon : (2001-2004)
- Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2009)

## **2. Non Formal**

- Pondok Pesantren Buntet Pesantren Cirebon

## **II. Pengalaman Organisasi**

- Wakil Ketua Ikatan Silaturrahim Alumni Buntet Pesantren Cirebon ( INSAN BPC ) D.I. Yogyakarta Periode 2007-2008
- Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Rayon Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2005-2006
- Anggota Divisi Pengkaderan BEM-J Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004-2005
- Anggota Divisi Pengkaderan Komisariat PMII Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2008
- Staf Menteri Luar Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa ( DEMA ) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2008
- Koordinator Divisi Teater SANGGAR NUUN, Badan Otonomi Mahasiswa Fakultas ( BOM-F) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2009